

Angie Harus Berkata Jujur

[JAKARTA] Pengadilan Tipikor Jakarta pada Kamis (6/9) akan menggelar sidang perdana kasus dugaan pencermatan hadiah terkait penganggaran di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kempora) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dengan calon terdakwa politikus Partai Demokrat Angelina Sondakh (Angie).

Terkaik sidang perdana tersebut, Angie harus berkata jujur dan buka-bukaan. Hal itu dikatakan pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia Indriyanto Seno Adji, pakar hukum dari Universitas Trisakti, Jakarta, Andi Hamzah, dan Juru Bicara KPK Johan Budi kepada SP di Jakarta, Rabu (5/9).

Menurut Indriyanto, untuk kasus Kempora dan Kemdikbud, dugaan Angie menerima hadiah atau jangji justru

menunjukkan bahwa peran perempuan itu hanya pintu masuk dari kasus dan pelaku besar. Oleh karena itu, Angie diharapkan mau berkata jujur dan buka-bukaan.

"Masyarakat juga tentu berharap KPK dapat membuka tabir tersangka utama (*prime suspect*) yang utuh dan sebenarnya dari kasus tersebut. Apakah dia pejabat publik atau tokoh sentral partai," tuturnya.

Andi Hamzah menambahkan, proses pengadilan kasus Angie bergantung pada dirinya sendiri, Mantan Wasekjen Partai Demokrat itu harus menanggung sendiri semua tuduhan mantan Bendahara Umum PD M Nazaruddin atau mengajak orang lain untuk mempertanggungjawabkan bersama.

Ke halaman > 5

17 Aliran Dana ke Angelina Sondakh dan Wayan Koster

Tanggal	Penerima	Proyek	Jumlah
12 Mar 2010	Komisil X lewat Angelina	Universitas 2010	Rp 70 juta
13 Apr 2010	Angelina	-	US\$ 100.000 (Rp 900 juta)
19 Apr 2010	Angelina/Koster	Universitas 2010	Rp 2,5 miliar
4 Mei 2010	Angelina	Universitas 2009	Rp 3 miliar
5 Mei 2010	Angelina/Koster	Kempora	Rp 3 miliar
5 Mei 2010	Angelina/Koster	Kempora	Rp 2 miliar
19 Juni 2010	Angelina/Koster	Universitas 2010	US\$ 100.000 (Rp 900 juta)
2 Sep 2010	Angelina	Universitas 2010	US\$ 150.000 (Rp 1,35 miliar)
14 Okt 2010	Angelina/Koster	Universitas 2010	US\$ 100.000 (Rp 2,7 miliar)
14 Okt 2010	Angelina/Koster	Universitas 2010	US\$ 200.000 (Rp 1,8 miliar)
17 Okt 2010	Angelina/Koster	Universitas 2010	US\$ 400.000 (Rp 3,6 miliar)
26 Okt 2010	Angelina/Koster	Universitas 2010	US\$ 500.000 (Rp 4,5 miliar)
3 Nov 2010	Angelina/Koster	Universitas 2010	US\$ 500.000 (Rp 4,5 miliar)
22 Nov 2010	Angelina untuk	-	-
	sumbangan Merapi	Universitas 2010	Rp 10 juta
18 Feb 2011	Pembangunan pura/Koster	Universitas 2011	Rp 50 juta
1 Mar 2011	Komisil X lewat Angelina	Universitas 2011	US\$ 100.000 (Rp 900 juta)
3 Mar 2011	Koster	Universitas 2011	Rp 500 juta
TOTAL			Rp 32,28 miliar

Berkas sumber: Litbang SP



Foto: ANTARA, Grafik: ANTON

Angie Harus Berkata Jujur

dari halaman 1

Jika Angie memikul sendiri kasusnya, maka proses pengusutan kasus tersebut akan buntu. Sebaliknya, kalau dia ingin membagi tanggung jawab, maka kasus itu bisa diurus lebih lanjut dan bakal menyeret nama-nama besar. "Jadi, semua bergantung pada Angie, apakah dia mau memikul semua atau mau menyenangkai lagu 'apel Malang' dan 'apel Washington', seperti yang dilakukan Nazaruddin," ujarnya.

KPK pun berharap Angie mau buka-bukaan. Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, paling tidak, Angie mau berkata jujur seputar kepemilikan telepon genggam *BlackBerry*, yang sempat dibantahnya. Sebab, dari percakapan melalui *BlackBerry Messenger* (BBM) itu dapat diungkap soal aliran dana.

"Kami berharap ibu AS (Angelina Sondakh, Red) bisa mengatakan sejujur-jujurnya terkait dengan kepemilikan BB (Blackberry) dan soal yang lain," kata Johan. Dikatakan, KPK berharap dari sidang Angie nanti terungkap fakta dan data baru, sehingga kasus tersebut bisa dikembangkan tidak hanya sampai pada mantan PjH Indonesia itu.

Menurut Johan, KPK tidak akan berhenti sampai Angie, sehingga fakta dan data baru yang terungkap dari proses persidangan diperlukan untuk menjerat tersangka lain terkait kasus tersebut. Apalagi, fakta, data, dan kesaksian di persidangan memiliki nilai yang lebih akurat.

Seperti diketahui, kasus dugaan penerimaan hadiah terkait penganggaran di Kempora dan Kemdikbud terungkap berdasarkan pengembangan kasus suap pembangunan Wisma Atlet SEA Games, Palembang, dengan terdakwa M Nazaruddin. Angie resmi dijadikan tersangka pada 3 Februari 2012 dengan dugaan menerima jangji dan hadiah terkait penganggaran di Kempora dan Kemdikbud. Dia pun resmi ditahan KPK sejak 27 April

lalu.

Atas perbuatannya, Angie dijilat dengan Pasal 5 Ayat 2 atau Pasal 11 atau Pasal 12 huruf A UU Tipikor dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dalam perkembangannya, KPK menemukan 17 aliran dana mencurigakan ke Angie dan rekannya di Komisi X DPR I Wayan Koster, yang nilainya miliaran rupiah.

Sedangkan, nilai total proyek pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di sejumlah universitas negeri yang diduga dikorupsi Angie mencapai Rp 600 miliar. Total nilai tersebut diperoleh KPK dari proyek pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di 16 universitas negeri yang tersebar di seluruh Indonesia untuk tahun anggaran 2010/2011.

Tidak berhenti sampai di situ, Nazaruddin pernah mengatakan, Angie pernah mendapatkan uang Rp 5,5 miliar dari tiga universitas, yakni Universitas Tadulako, Universitas Haluoleo, dan Universitas Cendana. Sebagian uang itu digunakan untuk mencetak kalender bergambar Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Tidak hanya Angie, Nazaruddin juga memuding mantan pimpinan Bangkar DPR Mirwan Amir terlibat dalam penganggaran di Kemdiknas terkait proyek pengadaan sarana dan prasarana 16 universitas. Menurut Nazaruddin, Mirwan yang memerintahkan Angie dalam proyek pengadaan sarana dan prasarana di 16 universitas tersebut, sehingga Mirwan mendapat komisi dari proyek tersebut.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, 18 Laporan Hasil Analisis (LHA) terakhir yang diserahkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ke KPK, termasuk laporan transaksi mencurigakan milik Mirwan. Namun, ketika dikonfirmasi, KPK tidak mengaku dan mengatakan 18 LHA tersebut masih dalam tahap

analisis.

Tanpa Intervensi

Anggota Komisi Hukum Nasional (KHN) Frans Hendra Wintara berharap, kasus-kasus korupsi yang ditangani KPK berjalan tanpa intervensi politik. Dengan demikian, masyarakat dapat berharap bahwa kasus korupsi triliunan rupiah, yang melibatkan pejabat-pejabat tinggi, dapat terbongkar tuntas.

Namun, kenyataannya, kata dia, intervensi politik selalu ada dan para penegak hukum termasuk hakim sulit menghindarinya. Oleh karena itu, dia mengajak sulit berharap kasus korupsi Wisma Atlet bisa terbongkar tuntas.

"Hanya dengan penegakan hukum dan proses peradilan yang jujur, terbuka, imparial, dan bebas campur tangan politik, baru kasus korupsi dapat diharapkan hasil yang maksimal dan seluruh jaringan korupsi terbongkar," ujarnya.

Ia menegaskan, sungguh menyedihkan bila proyek olahraga dan pendidikan yang menyoal kesejahteraan rakyat dienyuk oleh wakil rakyat, yang notabene generasi muda politisi Indonesia. Umuk itu, Indonesia memerlukan revolusi moral dan membersihkan diri dari sikap dan perilaku koruptif.

Ahli hukum pidana Chairul Huda mengaku belum bisa berkomentar banyak mengenai kasus Angie, karena belum tahu dakwanya. Namun, menurutnya, Angie hanya salah satu korban politik, yang ditumbalkan dalam kasus tersebut.

"Kita tidak bisa terlalu berharap kepada KPK. Sebab, seperti dalam kasus Nazaruddin, pemberitaannya ramai, tetapi di pengadilan cuma urusan suap-menyuap, yang tidak lebih besar dari biaya memulangkan dia ke Tanah Air. Jadi, kita lihat saja nanti," kata dosen Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) itu. [R-14/N-8]